



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DENPASAR**

**TRIWULAN I
TAHUN 2025**





Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Resiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan ,pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati – hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Nomor 800.1.5.1/ 19 /2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal – hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi kepada unit kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 53 risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 53 risiko yang teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 9 risiko (16.98 % dari 53 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 9 risiko atau 16.98% dari jumlah/ populasi risiko prioritas.

c. Sebanyak 9 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah / populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak 9 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 9 atau 100% dari 9 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.

3. Terdapat 9 kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Alamat perusahaan tidak sesuai pada yang tercantum pada NIB sehingga perusahaan yang akan diawasi tidak ditemukan
- b. Perusahaan tidak melaporkan perpindahan lokasi usaha sehingga saat di survey perusahaan sudah tidak ada di lokasi tersebut
- c. Kurang validnya data UMKM pada saat survey lapangan dilakukan
- d. Adanya keengganan pemohon dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat secara online.

BAB IV

Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB V

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko di setiap program/kegiatan yang ada. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar terdapat 53 risiko yang teridentifikasi dan 9 diantaranya merupakan risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen resiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen resiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring resiko. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perijinan Keliling

Perijinan keliling dilaksanakan untuk mempercepat proses perijinan yang diajukan, sehingga masyarakat yang membutuhkan ijin tidak perlu datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap pengaduan dari masyarakat harus segera ditindak lanjuti.

3. Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan penanaman modal dilakukan agar perusahaan melaporkan LKPM tepat waktu sehingga meningkatkan realisasi investasi di Kota Denpasar.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

Diharapkan setiap Program/ kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 1

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik				
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis OPD				
1	Sulit menemukan UMKM yang memproduksi secara kontinyu	RSO.25.18.23.01	2	5	10
2	Pendataan UMKM belum optimal	RSO.25.18.23.02	4	2	8
3	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	5	4	20
4	Masih Adanya Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak tepat waktu	RSO.25.18.23.04	4	3	12
5	Pengembangan dan pemanfaatan data pada sistem perizinan belum maksimal	RSO.25.18.23.05	3	2	6
III	Risiko Operasional OPD				
1	pemanfaatan peta potensi	ROO.25.18.23.01	2	2	4
2	Proses penyusunan Peta Potensi tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.02	2	2	4
3	realisasi investasi tidak maksimal	ROO.25.18.23.03	4	2	8
4	Promosi investasi kurang maksimal	ROO.25.18.23.04	4	2	8
5	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	5	4	20
6	Pelayanan Pengaduan Masyarakat kurang optimal	ROO.25.18.23.06	4	3	12
7	Pelayanan perizinan belum optimal	ROO.25.18.23.07	3	3	9
8	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	4	4	16
9	Penyelesaian pekerjaan pengembangan sistem tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.09	3	2	6
10	Sistem yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	ROO.25.18.23.10	3	2	6
11	Layanan kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.18.23.11	3	3	9

12	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.12	4	4	16
13	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.13	4	4	16
14	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.14	4	4	16
15	ketidak sesuaian materi pembelajaran	ROO.25.18.23.15	4	3	12
16	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.18.23.16	3	4	12
17	Pengadaan Tidak Selesai Tepat Waktu	ROO.25.18.23.17	2	2	4
18	peningkatan biaya operasional	ROO.25.18.23.18	3	4	12
19	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.19	5	5	25
20	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.20	5	5	25
21	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.21	5	5	25
22	Risiko pelaksanaan PBJ melalui e-purchasing	ROO.25.18.23.22	4	3	12
23	ketidakakuratan data yang disajikan oleh pihak ketiga	RF.25.18.23.01	2	4	8
24	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.02	3	1	3
25	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.03	2	1	2
26	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.04	3	1	3
27	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.05	2	1	2
28	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.06	3	1	3
29	Pembuatan NIB yang tidak sesuai dengan ketentuan	RF.25.18.23.07	2	4	8
30	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.08	3	1	3
31	Pelayanan Perijinan yang belum transparan	RF.25.18.23.09	4	3	12

32	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.10	3	1	3
33	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.11	2	1	2
34	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.12	3	1	3
35	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.13	2	1	2
36	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.14	3	1	3
37	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.15	2	1	2
38	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.16	3	1	3
39	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.17	2	1	2
40	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.18	3	1	3
41	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.19	2	1	2
42	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.20	3	1	3
43	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.21	2	1	2
44	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.22	3	1	3
45	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.23	2	1	2

46	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.24	3	1	3
47	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.25	2	1	2
48	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.26	3	1	3

Denpasar, 8 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 2

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis OPD					
1	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	20	Kepala Dinas	kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM	kurang maksimalnya pencapaian nilai realisasi investasi
III	Risiko Operasional OPD					
1	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	20	Kepala Dinas	1. alamat perusahaan tidak sesuai dengan data OSS 2. adanya beberapa perusahaan fiktif 3. sarana prasarana kurang memadai	nilai realisasi investasi menjadi kurang optimal
2	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	16	Kepala Dinas	Koordinasi dengan OPD teknis belum dilaksanakan dengan maksimal	Penerbitan ijin tidak sesuai dengan janji layanan
3	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.12	16	Kepala Dinas	Adanya keterlambatan dalam mendapatkan data dari pusat	Menurunnya nilai SAKIP
4	Penyediaan gaji dantunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.13	16	Kepala Dinas	1. Terjadinya mutasi pegawai 2. Pengangkatan PPPK 3. Pegawai pensiun	Terganggunya pembayaran gaji
5	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.14	16	Kepala Dinas	Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai
6	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.19	25	Kepala Dinas	Tidak terkontrolnya pemakaian sumber daya jasa penunjang kantor	Tertundanya pembayaran tagihan air, listrik dan telpon akibat anggaran tidak tersedia
7	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.20	25	Kepala Dinas	Usia bangunan yang sdh lebih dari 10 tahun	Terganggunya optimalisasi pelayanan publik
8	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.21	25	Kepala Dinas	Petugas tidak cermat dalam melakukan perawatan gedung	Terganggunya optimalisasi pelayanan publik

Denpasar, 8 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008



Lampiran 3

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis OPD							
1	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan kemampuan petugas yang turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman tentang kelengkapan dokumen perijinan maupun tata cara pelaporan LKPM	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	DPMPPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha	1 tahun
III Risiko Operasional OPD							
1	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan kemampuan petugas yang turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman tentang kelengkapan dokumen	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	Kepala Dinas	1 tahun
2	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait	Menyediakan media konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Kepala Dinas	1 tahun
3	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.11	Melakukan Koordinasi dengan Pusat terkait percepatan rilis data	Melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memastikan data dapat diperoleh tepat waktu	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Kepala Dinas	1 tahun

4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.12	Melakukan koordinasi dengan BPKAD	Melakukan penyusunan perencanaan anggaran secara seksama	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Kepala Dinas	1 tahun
5	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.13	Melakukan koordinasi dengan BPKAD	Melakukan penyusunan perencanaan anggaran secara seksama	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Kepala Dinas	1 tahun
6	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.18	Mematikan komputer dan alat elektronik lainnya jika tidak digunakan	Memasang himbauan secara tertulis di masing-masing perangkat elektronik guna mengingatkan pengguna melakukan penghematan energi	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Kepala Dinas	1 tahun
7	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.19	Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	Melakukan pengecekan kondisi gedung secara rutin	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Kepala Dinas	1 tahun
8	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.20	Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	Melakukan pengecekan kondisi gedung secara rutin	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Kepala Dinas	1 tahun



Denpasar, 8 April 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar

(Handwritten signature)

Ida Bagus Bemy Pidada Rurus, ST.
 NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 4

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : 2. Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis OPD							
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Narasumber dari perwakilan BKPM RI	Pelaku usaha	6 kali	6 kali	
III Risiko Operasional OPD							
1	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Narasumber dari perwakilan BKPM RI	Pelaku usaha	6 kali	6 kali	
2	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Berkoordinasi langsung secara lisan	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
3	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Pengecekan pada sistem yang disediakan oleh BKPM RI, berkoordinasi secara lisan melalui pelaksanaan rapat/pertemuan dengan DPM/PTSP Provinsi	OPD Teknis terkait	Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Tahun	1 Tahun	
4	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Berkoordinasi langsung secara lisan, RKA Perangkat Daerah	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
5	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Berkoordinasi langsung secara lisan	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
6	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
7	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	

8	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
---	--	-----------------------------------	--------------------------------	---	---------	---------	--

Denpasar, 8 April 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 NIK: 197209241998031008

Lampiran 5

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemd Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2025 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : 2. Optimalnya Pelayanan Publik : Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Strategis OPD						
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	membentuk tim untuk turun lapangan secara langsung dan pemantauan melalui	Kepala Dinas	1 Tahun	1 Tahun	
III Risiko Operasional OPD						
1	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	membentuk tim untuk turun lapangan secara langsung dan pemantauan melalui sistem	Kepala Dinas	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Mengecek pengaduan/ permasalahan yang dimiliki masyarakat terkait	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
3	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Mengecek pada sistem yang disediakan oleh BKPM RI, maupun melakukan koordinasi dengan DPMPPTSP Provinsi Bali	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
4	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Menyusun RKA untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
5	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Menyusun RKA untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
6	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Melakukan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
7	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi BMD	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
8	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi BMD	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar 8 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

(Signature)

Ida Bagus Beny Widada Rurus, ST.
NIP. 197260241998031008



Lampiran 6

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik								
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
II	Risiko Strategis OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
III	Risiko Operasional OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Prida Rurus, ST.

NIP. 197200241998031008

